

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Saudi atau Arab Saudi adalah negara gurun pasir dengan total penduduk sebanyak 31.7 miliar yang didominasi mayoritas muslim (85-95% Sunni, dan 10-15% Syiah). Negara ini berbatasan dengan Laut Merah di barat dan Teluk Persia di timur. Selain itu, Arab Saudi juga berbatasan langsung dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar di timur, Oman di tenggara, serta Yaman di selatan.

Arab Saudi merupakan negara terbesar di Timur Tengah dan di pimpin oleh garis keturunan raja Saud (*Saud Family/House of Saud*) dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Wilayah Arab Saudi mencakup hampir seluruh wilayah Jazirah Arab (Semenanjung Arabia) dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km². Arab Saudi merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Aljazair (Nations Online, t.thn.).

Arab Saudi berperan aktif dalam setiap konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Selama bertahun-tahun Arab Saudi selalu mengandalkan *checkbox diplomacy*¹, perjanjian rahasia, negosiasi yang tenang, dan jaminan Amerika Serikat dalam mengamankan tujuan politik luar negerinya. Raja-raja Saudi bahkan harus mengeluarkan triliunan US\$ demi mencapai kepentingannya (Al-Shihabi, 2017). Jika dilihat secara historis, kebijakan luar negeri Arab Saudi berfokus pada empat pilar utama. Antara lain, Integritas wilayah, perlindungan rezim, kemakmuran ekonomi, dan promosi serta pelestarian bentuk pemerintahan monarki Islam.

¹ Kebijakan luar negeri yang secara terbuka mengandalkan pemberian bantuan ekonomi dalam upaya negara mendapatkan pertolongan diplomatik

Namun, karena pada mulanya pengaruh kerajaan sangat kecil dan kekuatan militer Arab Saudi masih berada di tahap awal maka perlindungan dari kekuatan global-lah yang dicari, dibuktikan dengan kemitraan Kerajaan Saudi dan Inggris pasca Perang Dunia I hingga berdirinya negara Arab Saudi pada tahun 1932. Pasca Perang Dunia II dan selama Perang Dingin berlangsung, Arab Saudi menjalin kemitraan baru dengan kekuatan global yang lebih kuat yaitu Amerika Serikat. Sumber daya minyak yang berlimpah menjadi alat Arab Saudi untuk mendapatkan pengaruh dan memperoleh status kemitraan strategis dengan Amerika Serikat (Deen, 2017).

Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud diangkat menjadi Raja Arab Saudi yang keenam pada tahun 2005 sampai 2015. Ia dianggap Dunia Barat laksana tokoh 'pembaharu'. Kebijakan luar negeri dibawah Raja Abdullah berusaha untuk mendiversifikasi hubungan bilateral Arab Saudi. Pada periode inilah Arab Saudi melakukan kunjungan ke Tiongkok, Rusia, India, dan Pakistan di tahun 2006-2007, karena invasi Amerika Serikat terhadap Irak yang disertai dengan penggulingan rezim Saddam Hussein membuat Arab Saudi tidak bisa hanya bergantung pada Amerika Serikat. Kerajaan Saudi melihat Irak dibawah pemerintahan Saddam bak benteng melawan Iran yang selama ini dianggap sebagai pesaing regional. Iran merupakan ancaman bagi Arab Saudi, bahkan hingga sekarang Arab Saudi enggan membuka hubungan diplomasi dengan Iran. Tidak ada satupun perwakilan diplomatik Arab Saudi di tanah persia tersebut (Deen, 2017).

Rivalitas Arab Saudi-Iran seringkali mewarnai peperangan di kawasan Timur Tengah. Salah satunya, Arab Saudi terlibat secara langsung membantu Irak pada Perang Iran-Irak tahun 1980. Hubungan keduanya memanas lantaran Arab Saudi mendukung Saddam Hussein dengan memberikan bantuan sebesar US\$ 25 miliar dan mendesak negara-negara Teluk lain menyumbangkan dana perang untuk Irak (Debora, 2017). Keduanya juga terlibat di Perang Saudara Yaman. Konflik bermula dari serangan udara Arab Saudi pada Maret 2015

kepada pemberontak Houthi, yang merupakan sekutu Iran (Fanani, 2016, hal. 4). Kemudian, rivalitas yang paling terbaru tentu saja peran kedua negara dalam menyemarakkan Konflik Suriah.

Sejak akhir tahun 2010, gelombang *Arab Spring* yang terjadi di Tunisia dan Mesir telah menginspirasi negara-negara Timur Tengah untuk melakukan revolusi, termasuk Suriah. Presiden Suriah, Bashar al-Assad sudah memimpin Suriah selama hampir 17 tahun sejak 2000 dan masa pemerintahannya dinilai sangat otoriter. Ia mengklaim dirinya sebagai pemimpin sah dengan legitimasi penuh terhadap rakyatnya sehingga segala macam usaha menjatuhkan pemerintahannya dianggap ilegal. Hal inilah yang melatarbelakangi gerakan anti-pemerintah di Suriah tahun 2011 silam (BBC, 2016).

Konflik bermula ketika 15 orang anak sekolah ditangkap dan disiksa oleh pemerintahan Bashar al-Assad karena membuat tulisan anti-pemerintah di sebuah dinding. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai dengan menyerukan demokrasi dan pembebasan terhadap 15 orang anak tadi, tetapi pemerintah Suriah kemudian merespon dengan brutal dan menembaki para demonstran. 4 orang meninggal pada tanggal 18 Maret 2011. Menanggapi respon pemerintah yang seperti itu kelompok oposisi lalu membentuk *Free Syrian Army* (FSA) dan mendukung Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah demi melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Dari sini protes dan demonstrasi tadi berkembang menjadi konflik yang mengerikan. Tercatat ada beberapa serangan menggunakan senjata kimia, contohnya di Ghouta pada tahun 2013 dan yang baru saja terjadi yaitu serangan gas mirip gas sarin di Khan Sheikhoun pada April 2017 (BBC, 2017).

Konflik Suriah tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi ada banyak negara hingga aktor non-negara yang berikutserta meramalkan konflik tersebut. Aktor-aktor utama yang memiliki tujuan strategis di Konflik Suriah, namun berada di luar area konflik seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi

kemudian Rusia, serta Iran disebut sebagai pihak ketiga (*third party*). Negara-negara tadi, meskipun tidak berperang secara langsung, tapi keterlibatan mereka sangat menentukan jalannya konflik dan masing-masing dari mereka mendukung salah satu pihak antara pemerintah Suriah ataupun kelompok oposisi.

Sedari awal konflik bergulir, Arab Saudi langsung merespon dengan agresif konflik internal Suriah tersebut. Hingga saat ini, Arab Saudi secara aktif memberikan bantuan persenjataan berat kepada kelompok oposisi FSA dengan harapan pemerintahan Bashar al-Assad dapat ditumbangkan secepatnya. Selain itu, Arab Saudi juga mengirimkan bantuan dana dimana para pejuang FSA diberitakan mendapat gaji dalam mata uang dollar atau euro yang mana gaji tersebut lebih tinggi dari rata-rata gaji pegawai pemerintah. Tujuannya adalah agar pegawai negeri Suriah berbalik mendukung kelompok oposisi (Moussaoui, 2014).

Pada tahun 2011 silam, Arab Saudi melalui pernyataan resmi Raja Abdullah mengecam keras tindakan Bashar al-Ashad di Suriah, “Banyak orang yang telah menjadi martir, darah mereka telah ditumpahkan dan banyak lainnya telah terluka... Ini tidak sejalan dengan agama, nilai-nilai dan moral.” ujar Raja Abdullah (detiknews, 2011), pernyataan tadi diikuti dengan penarikan duta besar Arab Saudi di Suriah. Dalam berbagai kesempatan di forum-forum multilateral, Arab Saudi selalu berusaha memaksimalkan kesempatan tersebut menyuarakan dukungannya kepada pihak oposisi. Pada pertemuan Liga Arab di Kuwait 2014 silam, Raja Salman bin Abdulaziz—yang saat itu masih merupakan putra mahkota Kerajaan Saudi—meminta para pendukung pihak oposisi Suriah agar menyediakan lebih banyak senjata demi melancarkan proses penggulingan Presiden Bashar al-Assad (VOA, 2014).

Baru-baru ini, kabarnya Arab Saudi bersedia dan siap mengirimkan pasukannya ke medan perang demi mendukung upaya apapun yang dipimpin Amerika Serikat dalam rangka

menstabilkan situasi di Suriah. Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir (Ausaf, 2018) mengatakan “Kami sedang dalam perundingan dengan Amerika Serikat tentang pengiriman pasukan ke Suriah”, ia juga menegaskan “Keinginan mengirimkan pasukan bukanlah hal baru bagi Arab Saudi, dulu di masa pemerintahan Presiden Obama, kami sempat mengirimkan proposal yang berbunyi jika Amerika Serikat mengirim pasukan, maka Arab Saudi akan ikut serta bersamanya”.

Di tengah berbagai kecaman oleh negara-negara Arab terhadap pemerintahan Bashar al-Assad, Iran justru menunjukkan sikap sebaliknya dalam menyikapi Konflik Suriah. Iran dengan tegas menyatakan dukungannya kepada rezim Bashar al-Assad. Melalui Presiden Iran, Hassan Rouhani menyampaikan “Negara Iran akan tetap berada di sisi negara Suriah dalam memerangi terorisme dan menjaga integritas teritorial Suriah,” (Christiastuti, 2017). Pernyataan Hassan Rouhani jelas mencerminkan keseriusan Iran terhadap Konflik Suriah dan menunjukkan hubungan baik kedua negara.

Iran-Suriah memiliki kerja sama militer yang telah berlangsung lama. Terhitung dari tahun 2006, pakta pertahanan keduanya telah terbentuk. Kala itu, pakta pertahanan tersebut digunakan untuk melawan Amerika Serikat di Perang Irak. Iran memandang perang Suriah sebagai bagian dari perlawanan terhadap Dunia Barat yang sedang memperluas pengaruhnya ke negara-negara Arab. Iran bahkan menyebut Arab Saudi ‘budak Barat’ (Svensson, 2013).

Iran mengirim 4000 pasukannya langsung ke Suriah pada tahun 2013. Sampai saat ini, Iran diyakini mengontrol lebih dari 70.000 pasukan di Suriah yang terdiri dari berbagai kelompok, tidak semuanya merupakan tentara Iran. Pada tahun 2015 lalu, Bashar al-Assad berada dalam situasi kritis dan hampir saja tumbang di tangan oposisi jika Rusia bersama aliansinya Iran tidak datang memberikan bantuan militer. Akibat intervensi

kedua negara tadi, Assad berhasil memperpanjang masa kepemimpinannya (Newton, 2017).

Dari fakta-fakta diatas, kita perlu mengetahui apa yang mendasari Arab Saudi turut melibatkan diri dalam Konflik Suriah melalui perang proksi. Oleh karena itu Menarik untuk mengkaji lebih jauh mengapa Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah pada tahun 2011-2018?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah mengapa Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah pada tahun 2011-2018?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan dua landasan teori yaitu:

1. Teori Perang Proksi

Perang proksi adalah bentuk konfrontasi antara pihak yang berperang dengan menggunakan pihak lain sebagai pengganti aktor utama. *The Rusi Journal*, edisi 158 yang diterbitkan pada tahun 2013 melalui artikel yang ditulis oleh Andrew Mumford, mendefinisikan istilah perang proksi “... *conflicts in which a third party intervenes indirectly in order to influence the strategic outcome in favour of its preferred faction...*”. Menurutnya Andrew Mumford, pihak yang berkonflik hanyalah kepanjangan tangan dari negara lain yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan strategis (Mumford, 2013, hal. 40).

Dalam teori ini, pihak yang berkonflik langsung disebut perpanjangan tangan² dan pihak yang memanfaatkan mereka—

² Proksi

sekaligus aktor utama—disebut pihak ketiga. Apabila kita aplikasikan pada Konflik Suriah, maka pihak pemerintah dan oposisi adalah perpanjangan tangan dari pihak ketiga, yaitu Arab Saudi dan Iran yang memiliki tujuan strategisnya sendiri.

Erin Schreiner (2017) mendefinisikan tujuan strategis, yaitu sasaran yang dibuat untuk mengidentifikasi capaian-capaian perusahaan (Screiner, 2017). Sebagai perbandingan, menurut situs web Bussiness Dictionary, tujuan strategis adalah tujuan yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu dan harus mencerminkan penilaian realistis terhadap lingkungan yang diproyeksikan (Bussiness Dictionary, 2018). Jadi, meskipun belum ada kesepakatan khusus mengenai apa itu tujuan strategis di tingkat negara, tapi dari dua pengertian di atas dapat kita pahami bahwa tujuan strategis merupakan identifikasi terkait hasil realistis yang ingin dicapai oleh negara dalam periode waktu tertentu.

Jika diaplikasikan ke Arab Saudi maka tujuan strategis disini merupakan pencapaian yang diharapkan oleh rezim sekarang dan merupakan salah satu indikator capaian kesuksesan rezim. Sejak dipimpin oleh Raja Salman pada tahun 2015, Arah kebijakan Arab Saudi didasarkan pada 3 tujuan strategis; memperkuat militer, mengevaluasi aliansi, dan secara agresif menahan ekspansi kekuatan Iran dalam rangka meraih hegemoni kawasan termasuk persaingan keduanya di Konflik Suriah (Al-Shihabi, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hegemoni adalah dominasi suatu negara atas negara lain (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, t.thn.).

Politik internasional kemudian mengenal istilah *Sphere of Influence*. Istilah ini dimaknai sebagai kontrol dominan sebuah negara terhadap sebuah wilayah asing di luar wilayah yurisdiksinya, dengan kata lain perpanjangan tangan berada di bawah *Sphere of Influence* pihak ketiga (Fanani, 2016, hal. 9).

Bagi Arab Saudi jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad bisa berarti pergantian pemimpin dari minoritas Syiah sebagai rezim sekarang ke mayoritas Sunni Suriah yang merupakan pihak oposisi. Jika sesuai dengan skenario di atas, maka Iran akan kehilangan salah satu aliansinya, yaitu Suriah yang sangat berpengaruh terhadap persaingan hegemoni antara Arab Saudi-Iran di kawasan Timur Tengah (Newton, 2017).

2. Teori Pilihan Rasional

Graham T. Allison membagi teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) ke dalam tiga model, 1.) Model Aktor Rasional; 2.) Model Proses Organisasi; 3.) Model Politik Birokratik (Sawhani, 2018). Pada penelitian ini, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional.

Model Aktor Rasional menganggap negara sebagai aktor cerdas yang berupaya memaksimalkan pencapaian tujuannya dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi dalam membuat keputusan yang rasional, dimana keputusan akhir merupakan putusan dengan probabilitas keuntungan tertinggi dengan biaya terkecil (Sawhani, 2018). Pada jurnal *The American Political Science Review (Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis)*, Graham T. Allison, menyatakan:

“The assumption of rational behavior not just of intelligent behavior, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation that in turn is based on an explicit and internally consistent value system.” (Allison, 1969).

Biasanya, Model Aktor Rasional menekankan pengambilan keputusan lebih kepada pihak eksekutif, yaitu Presiden atau kepala pemerintahan suatu negara yang dipandang sebagai individu tunggal. Namun, dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang Realis yang menganggap negara sebagai aktor utama hubungan internasional (*the state-centric assumption*). Dikutip dari *Politics Among Nations*, Hans J.

Morgenthau (Morgenthau, Thompson, & Clinton, 2005) mengatakan “*It cannot be denied that throughout historic time, regardless of social, economic and political conditions, state have met each other in contests for power.*”. Selama berabad-abad, konteks hubungan internasional selalu identik dengan kontestasi antar negara satu sama lain, tidak terkecuali di masa sekarang. Morgenthau menambahkan, politik internasional sama halnya dengan politik lainnya, apapun tujuannya, kekuatan (*power*) selalu menjadi sasaran utama (Morgenthau, Thompson, & Clinton, 2005).

Perilaku negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional digerakkan secara rasional oleh kepentingan nasional, terutama keinginan negara untuk *survive* dari ancaman-ancaman luar yang dapat memengaruhi keamanan nasional. Kaitannya dengan Model Aktor Rasional adalah pengasumsian negara disini sebagai aktor tunggal, artinya negara bertindak atas kesadarannya sendiri dengan berlandaskan kepentingan nasional. Jadi siapapun Presiden atau kepala pemerintahannya tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap kepentingan nasional, karena kepentingan nasional biasanya merupakan cita-cita dari suatu negara yang menjadi dasar negara dan diwariskan secara turun temurun dari pemimpin sebelum hingga seterusnya (Dugis, 2006). Apabila diaplikasikan pada studi kasus perang proksi antara Arab Saudi dan Iran, keputusan Arab Saudi melakukan perang proksi kepada Iran tentu saja sudah didasarkan pada kalkulasi matematis dengan mempertimbangkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil yang bisa diraih Arab Saudi untuk mencapai kepentingan nasional maupun tujuan strategisnya.

President Dwight D. Eisenhower (Mumford, 2013, hal. 40) menyebut perang proksi sebagai “asuransi termurah di seluruh dunia”, Penggunaan istilah ‘asuransi termurah’ dimaksudkan untuk menonjolkan daya tarik perang proksi sebagai bentuk lain dari ‘perang’ dengan pertimbangan keuntungan dan biaya yang lebih murah dibanding perang konvensional. Disini, penulis

mengembangkan logika pada setiap keuntungan dan biaya dari perang proksi melalui tabel dibawah:

Tabel 1.1 Keuntungan dan Biaya Perang Proksi

Perang Proksi	
Keuntungan	Biaya
Memerluas pengaruh pihak ketiga di dalam konflik	Meningkatnya biaya pengendalian (<i>control cost</i>) terhadap pihak lokal sebagai perpanjangan tangan
Tidak adanya korban jiwa dari pihak ketiga	Sumber daya yang terbuang untuk pihak lokal yang saling bertarung dan mati
Terhindar dari eskalasi yang tidak diinginkan pihak ketiga	Pihak ketiga kehilangan dukungan domestik
Pihak ketiga dapat menyembunyikan keterlibatannya	
Meningkatkan dukungan dari aktor negara/non-negara selaku perpanjangan tangan dari pihak ketiga	

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Sejauh ini, belum ada satupun korban jiwa dari Arab Saudi di Konflik Suriah. Selain itu, pengaruh Arab Saudi di Suriah mulai terasa nyata dan menjadi ancaman bagi Bashar al-Assad. Hal ini dikarenakan pemerintahan Raja Salman semakin gencar

meningkatkan upaya-upaya melawan rezim Assad. Pada awal bulan Desember tahun 2015, Arab Saudi mengadakan pertemuan dengan mayoritas kelompok oposisi Suriah yang sepakat untuk mengakhiri Konflik Suriah. Tentunya dengan menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Bahkan beberapa hari kemudian Arab Saudi sudah membentuk “*Islamic Military Coalition*” dengan 34 negara untuk menantang aliansi Rusia-Iran (Karmon, 2018). Kemudian kita dapat memahami bahwa Arab Saudi memilih melakukan perang proksi terhadap Iran dikarenakan perang proksi merupakan pilihan paling menguntungkan dengan biaya paling sedikit dibandingkan perang biasa yang mengharuskan kedua belah pihak berhadapan langsung, mengingat keterlibatan Iran pada konflik ini sudah sampai tahap yang cukup serius karena harus turun tangan secara langsung.

Perang proksi adalah pilihan paling masuk akal bagi negara-negara yang ingin memaksimalkan tujuan strategisnya, tapi di saat bersamaan tidak ingin terlibat dalam konflik, khususnya perang karena akan merugikan dari sisi biaya dan keuntungan.

D. Hipotesis

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan merujuk pada kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil hipotesis Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran dikarenakan:

1. Arab Saudi ingin memperkuat hegemoni kawasan Timur Tengah dengan menjatuhkan rezim Bashar al-Assad yang merupakan sekutu Iran.
2. Perang Proksi merupakan pilihan paling masuk akal bagi Arab Saudi dalam persaingannya memperebutkan hegemoni kawasan Timur Tengah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mengapa Arab Saudi memilih melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah.
2. Membuktikan bahwa Arab Saudi sebagai pihak yang bersaing dengan Iran lebih memilih keputusan yang rasional atau menguntungkan dalam rangka memenangkan persaingan hegemoni kawasan Timur Tengah.

F. Jangkauan Penelitian

Demi menjaga efektivitas sebuah karya tulis, maka penulis membatasi jangkauan penelitian agar tidak terlalu luas pembahasannya. Jangkauan penelitian pada karya tulis ini memfokuskan pada alasan apa saja yang mendasari keputusan Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah. Mengacu pada jangkauan penulisan tersebut, penulis membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2011 (awal Konflik Suriah) hingga tahun 2018.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data yang tidak bergantung pada angka karena lebih menekankan pada analisis sosial atau kualitas sampel data yang dijadikan rujukan. Bersifat eksplanatif artinya karya tulis ini mencari sebab-akibat dan alasan mengapa suatu fenomena tertentu terjadi.

Paradigma yang digunakan adalah Studi Kasus, Rahardjo dan Gudnanto dalam buku “Pemahaman Individu Teknik Non Tes” menjelaskan bahwa Studi Kasus merupakan suatu metode

untuk memahami subjek atau objek secara integratif dan komprehensif (Rahardjo & Gudnanto, 2011); Demi keperluan pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data sekunder dengan cara studi pustaka melalui publikasi/buku, data mentah, internet, atau media lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka penulis membagi sistematika penulisan pada karya tulis ini kedalam 5 bab yaitu:

Bab I, menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam Perang Proksi antara Arab-Saudi Iran di Konflik Suriah 2011-2018, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, membahas tentang profil Arab Saudi, sejarah, kepentingan dan arah kebijakan luar negeri, kebijakan masa kini, sampai riwayat persetujuan Arab Saudi-Iran.

Bab III, menjelaskan Konflik Suriah dari tahun 2011-2018, kronologi konflik, pihak-pihak yang terlibat, dan keterlibatan Arab Saudi dalam Konflik Suriah.

Bab IV, menyajikan pertimbangan mengapa Arab Saudi memilih melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah dan penjelasan mengenai keuntungan serta biaya perang proksi dalam upaya Arab Saudi mencapai tujuan strategisnya (hegemoni kawasan).

Bab V, berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya yaitu kesimpulan